

## ***Collaborative Governance* dalam Pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak**

**Muh. Fachruddin<sup>1</sup>, Muhammad Nur<sup>2</sup>, Hasan Basri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Fakfak

Email: [muh\\_fachruddin@polinef.id](mailto:muh_fachruddin@polinef.id)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan serta perilaku masyarakat dalam segala hal selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi tantangan berat berupa kemampuannya beradaptasi di era revolusi industri 4.0. Untuk menghadapi dan memanfaatkan momentum era revolusi Industri 4.0 ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu berkolaborasi dengan *stakeholder* baik dari pemerintah dan non pemerintah perlu bersinergi agar dapat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkan pemerintah atau *stakeholder* agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan sarana dalam pemanfaatan internet dalam pengembangan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara yang dilakukan pada pihak pemerintah daerah dan non pemerintahan. Proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 di Kab. Fakfak belum dapat terlaksana dengan optimal karena belum adanya kerjasama yang berkelanjutan diantara *stakeholder*, Ego sektoral dan belum adanya wadah koordinasi dari masing-masing *stakeholder*. Faktor pendukung proses *Collaborative Governance* yaitu adanya komitmen untuk pengembangan UMKM yang berbasis *digital*. Belum adanya media informasi atau komunikasi baik, kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat proses.

**Katakunci:** *Collaborative Governance*, *Digital Marketing*, UMKM.

### **Abstract**

The rapid development of technology provides changes in all aspects of life and people's behavior, in any case, they always want speed, accuracy and efficiency. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) face tough challenges in the form of their ability to adapt in the era of the industrial revolution 4.0. To face and take advantage of the momentum of the industrial revolution era 4.0, micro, small and medium enterprises (MSMEs) need to collaborate with *stakeholders*, both government and non-government, need to work together in order to be able to apply technology developed by the government or *stakeholders* so that MSME actors have the knowledge and means to Internet use in business development. The purpose of this study was to analyze the *Collaborative Governance* process in the development of MSMEs and to identify the supporting and inhibiting factors for the *Collaborative Governance* process in the development of MSMEs in the Industrial Revolution 4.0 era in Fakfak Regency. The method used is descriptive qualitative method by conducting observations and interviews conducted on the part of the local government and non-government. The

*Collaborative Governance* process in the development of MSMEs in the era of the industrial revolution 4.0 in Kab. Fakfak cannot be carried out optimally because there is no sustainable collaboration between *stakeholders*, sectoral egos and there is no place for coordination from each stakeholder. The supporting factor for the *Collaborative Governance* process is the commitment to the development of digital-based MSMEs. The absence of good information or communication media, lack of facilities, lack of human resources are the inhibiting factors for the process.

**Keyword:** *Collaborative Governance*, digital marketing, MSMEs.

## PENDAHULUAN

Saat ini kita telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pergeseran rantai pasok perusahaan yang terhubung secara digital menjadi lebih sederhana. Kondisi ini terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Penggunaan internet yang cepat juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis juga terlihat pertumbuhan yang luar biasa dalam bisnis *online* maupun *offline* atau bisnis tradisional. Bisnis *online* yang saat ini berkembang adalah *e-commerce*, tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga perkembangan media informasi yang pesat.

Kolaborasi didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi dari beberapa elemen yang saling berhubungan, dan melibatkan orang, lembaga atau pihak secara langsung maupun tidak langsung, memperoleh akibat dan manfaat (Haryono, 2012). Dalam konteks ini, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi terkait seperti komunitas pemasaran digital dan asosiasi perdagangan dapat bersama-sama melakukan proses pelaku UMKM untuk bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Konsep kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola urusan publik lebih dikenal dengan istilah *Collaborative Governance*.

Kabupaten Fakfak sendiri mempunyai 5.942 UMKM yang tercatat namun hanya 1.753 yang aktif pada Dinas Koperasi dan UKM dan terdapat 388 UMKM terdaftar pada Dinas Penanaman Modal namun 57 diantaranya memiliki risiko tinggi pada usahanya. Platform pesan antar berbasis lokal juga telah hadir di Kabupaten Fakfak, namun hingga saat ini hanya 30 UMKM yang menjadi Mitra pada platform tersebut, yang menandakan bahwa pelaku UMKM belum tertarik dalam hal digital marketing. Masih minimnya pemanfaatan internet untuk digital marketing atau menggunakan *ecommerce* berhubungan tingginya indeks kemiskinan digital. Papua dan Papua Barat merupakan Provinsi yang memperoleh indeks kemiskinan digital yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena individu yang miskin informasi (*information poor*) atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (Sakti, 2022). Komitmen penuh pemerintah diperlukan dalam mendukung UMKM di Kabupaten Fakfak untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka studi ini akan difokuskan pada peran yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk membantu proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0, khususnya di Kabupaten Fakfak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak.

### **Collaborative Governance**

Berbagai kerjasama antara *stakeholder's* dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kerjasama antar *stakeholder* yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *Collaborative Governance*. Ansell, C & Gash, A, (2007) menjelaskan *Collaborative Governance* atau pemerintahan kolaboratif merupakan strategi baru dari pemerintahan. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholder* dengan aparat pemerintah untuk membuat keputusan bersama dalam sebuah forum. Proses kolaboratif berlangsung dalam beberapa tahap, Ansell dan Grash (2007) menjelaskan proses

tata kelola kolaboratif sebagai berikut:

1. *Face to face dialogue*

Semua bentuk *Collaborative Governance* dibangun dari dialog langsung dengan masing-masing pemangku kepentingan. Sebagaimana *Collaborative Governance* yang berorientasi proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah sekedar negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat mengurangi ego dan ketidaksediaan dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama.

2. *Trust building*

Buruknya rasa percaya antar stakeholder merupakan hal yang biasa terjadi pada awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan hanya terkait negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, pemimpin harus sadar akan pentingnya kolaborasi.

3. *Commitment to process*

Komitmen mempunyai hubungan yang erat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan dorongan untuk terlibat atau bergabung dalam *Collaborative Governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah risiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

4. *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

5. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan ketika "small wins" dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah pendorong dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi yang ada Indonesia. Bahkan dari segi manajemen masih berkaitan erat dengan perekonomian semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik swasta dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha, kecuali anak perusahaan atau afiliasi yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang tidak merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel. 1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset**

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha mikro	Maksimum Rp50 juta	Maksimum Rp300 juta
2	Usaha kecil	< Rp50 – 500 juta	< Rp300 juta – 2,5 milyar
3	Usaha menengah	< Rp500juta – 1 milyar	<Rp2,5milyar– 50 milyar

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

#### **Revolusi Industri 4.0**

Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kalidi Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital.

Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.

#### **Kerangka Pikir**

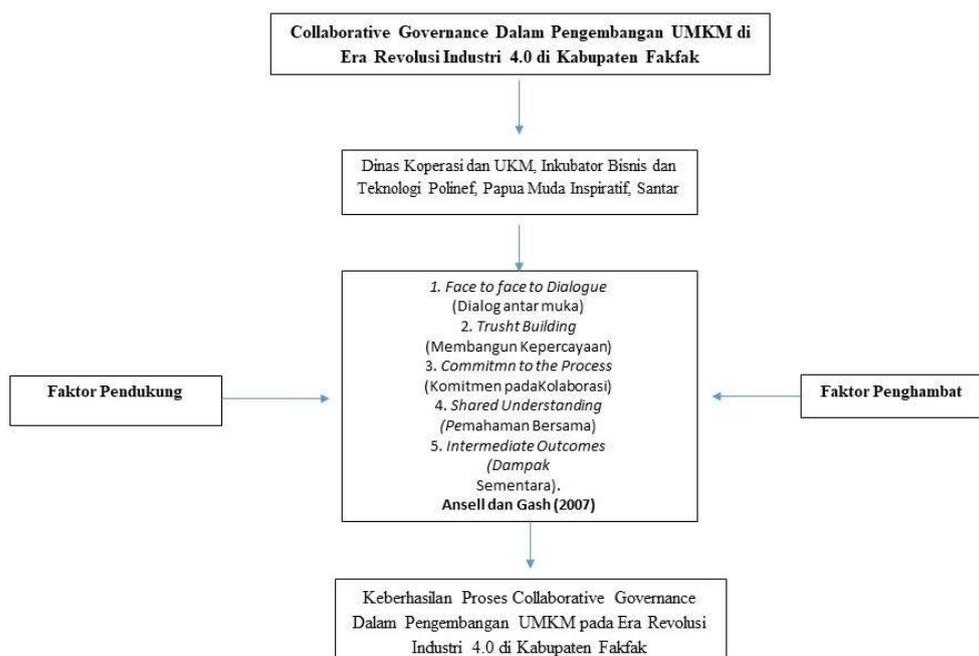
Penelitian dengan topik *Collaborative Governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang hasilnya relevan untuk dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian Sururi (2018) memberikan gambaran bahwa dalam proses *Collaborative Governance* terdapat 3 (tiga) isu yang menjadi prioritas dan strategis yang harus dilakukan dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yaitu dimensi struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima. Kurniasih, et.al (2017) dalam penelitiannya *Collaborative Governance* dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, menunjukkan bahwa Kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bersifat *top-down* menghasilkan kinerja kelembagaan yang belum optimal pada program SLBM di Kabupaten Banyumas. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam interaksi sosial melalui kolaboratif diantara *stakeholders* agar pelaksanaan program berbasis masyarakat lebih efektif sesuai ekspektasi masyarakat. Penelitian Purnomo (2018) terkait *collaborative*

*governance* dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat menyimpulkan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan sumber daya hutan (SDH), pengelolaan SDH yang lebih mendorong industri besar tetapi mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Tata kelola SDH juga belum mampu mengurangi pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal dan alih fungsi lahan hutan secara massif.

Annisa Aulia Akbar (2021) berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Pasikola di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, namun perlu untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan sosialisasi tentang Program Pasikola. Penelitian Nur Cahya (2020) menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* yang meliputi 5 dimensi untuk melihat *Collaborative Governance* yang terjadi yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *process collaboration* (proses kolaborasi). Terdapat beberapa perbedaan serta persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan itu muncul dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai beragam fokus dan lokasi yang diteliti, berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis proses *Collaborative Governance* dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0. di Kab. Fakfak dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansel dan Gash (2007).

*Collaborative Governance* terus berkembang dalam dunia pemerintahan karena adanya kompleksitas dan keterkaitan antara institusi dimana persoalan publik tidak mudah ditangani oleh satu instansi pemerintah saja, adanya kolaborasi sangat dibutuhkan agar persoalan publik tersebut dapat dihadapi dengan lebih baik. Tahapan proses kolaboratif harus dipertimbangkan sebagai strategi untuk mengelola isu publik. Penggabungan ide dalam hal ini untuk mencapai tujuan menggunakan indikator komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), yang membagi beberapa komponen kolaborasi diantaranya; *Face to face to Dialogue* (Dialog antar muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment to the Process* (Komitmen pada Kolaborasi), *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian teoritis yang telah diuraikan, maka diagram kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar. 1 Kerangka Pikir**



Sumber: Peneliti

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar makna yang berasal dari masalah sosial dapat dipahami dengan memberikan gambaran secara keseluruhan dan kompleks (Cresswell, 2014). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti agar mampu mengidentifikasi masalah dari sudut pandang informan atau partisipan serta memahami arti dan interpretasi terhadap tingkah laku, kejadian, atau objek. Pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara pada pelaku UMKM, pihak pemerintah daerah dan non pemerintahan yang memiliki peran terhadap pengembangan UMKM untuk dapat beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak melalui *Collaborative Governance*.

Informan penelitian adalah orang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti. Informan yang dimaksud adalah Sopia Hindom (SH) sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kurniati (K) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM serta Arga Ramadhana (AR) sebagai Ketua IBT (Inkubator Bisnis dan Teknologi) Politeknik Negeri Fakfak.

### Tahapan pada proses kolaboratif

*Collaborative Governance* dalam konteks pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan konsep Ansell dan Gash (2007). Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara (Ansell, C & Gash, A, 2007). Secara lebih detail masing-masing tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

### **Face to face dialogue (dialog tatap muka)**

*Governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Proses dari *Collaborative Governance* berorientasi pada kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi (Ansell, C & Gash, A, 2007). Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Dalam konteks pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 di Kabupaten Fakfak, proses dialog tatap muka dilakukan dengan pertemuan- pertemuan dalam bentuk rapat dan diskusi bersama para *stakeholder* yang terkait untuk membahas tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh para *stakeholder* untuk mengembangkan UMKM pada era revolusi industri ini.

Diantara hasil dari pertemuan dan diskusi tersebut adalah lahirnya rencana-rencana kegiatan dalam bentuk pelatihan, diskusi dan pameran *online* yang diselenggarakan secara bersama-sama terkait pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM. Selain adanya agenda pameran *online* untuk pengembangan UMKM berbasis digital di Kab. Fakfak, terdapat pula pertemuan rutin antar OPD terkait penyediaan fasilitas UMKM. Selain Dinas Koperasi dan UMKM Fakfak, terdapat pula kegiatan workshop, seminar dan pelatihan yang dilakukan Inkubasi Bisnis dan Teknologi (IBT) Politeknik Negeri Fakfak untuk mengembangkan UMKM di Kab. Fakfak. Selain pelatihan, workshop maupun seminar terdapat pula agenda rutin yang dilakukan oleh IBT dengan Mahasiswa Kewirausahaan dan Papua Muda Inspiratif (PMI) untuk mendiskusikan permasalahan yang ada.

### **Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Membangun kepercayaan dapat dilakukan setelah proses dialog tatap muka, terbangunnya kepercayaan terjadi ketika ada komunikasi yang baik diantara kolaborator. Poin penting dari mekanisme *Collaborative Governance* adalah pada aspek ini. Karena kinerja kolaborator menjadi tidak ada artinya tanpa adanya *mutual trust* diantara *stakeholder* yang berkolaborasi. Dalam konteks

*Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kab. Fakfak pada era revolusi industri 4.0, *trust building* ini terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan secara intens melalui diskusi, koordinasi, pelatihan, sosialisasi antara pelaku UMKM sendiri, Pemerintah (dinas-dinas), organisasi swasta (Perusahaan) dan aktor-aktor yang berasal dari masyarakat (asosiasi-asosiasi). *Trust building* ini semakin menguat setelah rencana kegiatan yang dirumuskan oleh para *stakeholder* dapat direalisasikan dan memberikan dampak yang besar bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pemasaran produknya.

### **Commitment to the process (komitmen terhadap proses)**

Komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar *collaborative process* dan berkaitan dengan motivasi bagi para aktor untuk mengimplementasikan *Collaborative Governance*. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pengembangan UMKM di Kab. Fakfak, Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya salah satunya menyalurkan bantuan. Hal senada juga dilakukan oleh IBT untuk membantu pengembangan UMKM di Kabupaten Fakfak, dengan melakukan diskusi dengan Pemerintah Daerah, Pelaku UMKM dan Pihak Swasta.

Proses kolaborasi dalam pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 ini dalam aspek komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu agar pelaku UMKM memperluas jejaring pasarnya dengan memanfaatkan teknologi pada era revolusi industri ini dan dapat meningkatkan pendapatannya. Namun, dalam kerjasama antar *stakeholder* masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, **maupun ego sektoral**. Dari internal pemerintah, *stakeholder* yang ada masih fokus pada kepentingannya masing-masing dan belum ada pembagian yang tegas terkait fokus dan lokus kerjanya. Demikian halnya dengan pihak lainnya seperti pihak swasta (Santar dan Papua Muda Inspiratif) maupun masyarakat namun demikian tetap dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan UMKM pada era revolusi industri ini, komitmen dari para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya tetap mengedepankan terwujudnya UMKM di Kab. Fakfak yang unggul dan mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0.

### **Shared Understanding (saling memahami)**

*Shared understanding* didefinisikan juga sebagai kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Pemahaman bersama idealnya dimiliki masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama, tidak berjalan semestinya. *Shared understanding* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 di Kab. Fakfak belum optimal. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari banyaknya program yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*. *Stakeholder* yang terkait dalam melakukan program maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari *stakeholder* lain. Bahkan masing-masing *stakeholder* tidak mengetahui program yang dilakukan oleh *stakeholder* yang lain dalam pengembangan UMKM di Kab. Fakfak pada era revolusi industri 4.0.

### **Intermediate outcomes (hasil sementara)**

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi sangat feasible dilakukan ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret. Meskipun *intermediate outcomes* dapat mewakili output nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses ini *intermediate outcomes* diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik

untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Keberhasilan kolaboratif governance dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Adanya Ruang Sekretariat dan Display Produk pada IBT Politeknik Negeri Fakfak, Dinas Koperasi dan UMKM juga telah mempunyai binaan yang siap untuk melakukan peningkatan mutu. Selain melakukan peningkatan mutu dan pengadaan alat terdapat pula home industri yang telah beroperasi namun belum optimal karena adanya permasalahan manajemen.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance***

### **Faktor Pendukung**

Hal-hal yang mendukung dan mendorong terjadinya *Collaborative Governance* pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0. di Kab. Fakfak. Terdapat program kerja terkait dengan pengembangan UMKM berbasis digital atau internet ini sementara masih digarap dengan Organisasi Perangkat Daerah, Selain Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Fakfak, Inkubasi Bisnis dan Teknologi Politeknik Negeri Fakfak juga sedang berfokus pada edukasi bisnis berbasis digital. Kemudian lebih lanjut IBT akan membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya

### **Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, faktor lain yang mempengaruhi proses *Collaborative Governance* pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0. di Kab. Fakfak ialah faktor penghambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Fakfak dan Ketua Inkubator Bisnis dan Teknologi Politeknik Negeri Fakfak, diketahui bahwa ada beberapa faktor penghambat proses *Collaborative Governance*. Permasalahan media informasi dan fasilitas yang terbatas, masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dari proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM berbasis digital.

## **SIMPULAN**

Pengembangan UMKM pada era revolusi Industri 4.0 melalui *Collaborative Governance* sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kab. Fakfak. *Collaborative Governance* dapat terbentuk dengan adanya peran dari berbagai *stakeholder* dengan kegiatan yang dapat mengembangkan UMKM berbasis digital. *Collaborative Governance* dapat dilakukan dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* diantaranya adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Pertanian, Dinas pariwisata Kab. Fakfak, Inkubasi Bisnis dan Teknologi Kab. Fakfak, Papua Muda Inspiratif, Santar, Masyarakat dan Asosiasi maupun lembaga lainnya yang ada di Kab. Fakfak.

Proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi industri 4.0 di Kab. Fakfak belum dapat terlaksana dengan optimal pada aspek *Shared Understanding* (saling memahami) walaupun telah ada kegiatan yang dilakukan bersama namun belum adanya kerjasama yang berkelanjutan diantara *stakeholder*, sehingga *stakeholder* hanya fokus melakukan kegiatannya masing-masing. Ego sektoral juga menjadi masalah dalam proses kolaborasi sehingga lebih mementingkan kegiatan-kegiatan atau pandangan masing-masing. Penyebab berikutnya dari belum optimalnya *Collaborative Governance* ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya forum koordinasi antar *stakeholder* yang sebagai wadah koordinasi dari masing-masing *stakeholder* yang memiliki concern yang sama.

Faktor pendukung proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi Industri 4.0 di Kab. Fakfak yaitu adanya komitmen untuk pengembangan UMKM yang berbasis digital baik berupa kegiatan dan edukasi pada UMKM yang berbasis digital yang dilakukan oleh para

*stakeholder*. Belum adanya media informasi atau komunikasi baik, kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM pada era revolusi Industri 4.0 di Kab.Fakfak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2021). *Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kualitas pelayanan Transportasi di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ansell, C, & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkeley: University Of California.
- Cahya, N. (2020). *Collaborative Governance dalam Penerapan Uang Elektronik (Unik) di Jalan Tol Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Cresswell, J. C. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications, Inc.
- Dinas Koperasi dan UKM. (2022). *Data Koperasi dan UMKM*. Kabupaten Fakfak: Dinas Koperasi dan UKM.
- Dinas Penanaman Modal dan Usaha. (2022). Kabupaten Fakfak: Pemerintah Daerah.
- Haryono, N. (-5. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Kurniasih, D., Setyoko, P., & Imron, M. (2017). *Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat*. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Fakfak. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2017*. Fakfak.
- Purnomo, E. P. (2018). *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Rinaldo, E., & Rahayu, S. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Inspirasi*, 10(1), 133-137.
- Sakti, P. (2022). Analisis Kemiskinan Digital Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(1), 113-120.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: SmartMedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. In *20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sururi, A. (2018). *Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)*. *Humanika*, 25(1), 24-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 . (2008). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)*. Indonesia.